
EVALUASI KINERJA PEREKONOMIAN DAERAH OTONOM BARU KABUPATEN PESAWARAN

Muhammad Fuaedi Hamami*, Dr. Ahmad Herison, S.T., M.T., Dwi Bayu Prasetya, S.Si., M.Eng

Perencanaan Wilayah dan Kota, Jurusan Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan, Institut Teknologi Sumatera
Jalan Terusan Ryacudu, Way Huwi, Jati Agung, Lampung Selatan 35365

Abstrak

Pemekaran daerah yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Seiring dengan perkembangannya daerah otonom baru perlu dievaluasi untuk mengukur sejauh mana pencapaian cita-cita pemekaran daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja perekonomian daerah otonom baru Kabupaten Pesawaran. Data penelitian dikumpulkan dengan menggunakan metode dokumentasi. Metode analisis yang digunakan ialah analisis deskriptif dan analisis Indeks Diversitas Entropi (IDE). Variabel penelitian yang digunakan ialah perkembangan ekonomi, perkembangan pendapatan daerah, perkembangan belanja daerah, perkembangan pendapatan per kapita, tingkat kemiskinan dan pengangguran. Hasil analisis dan pembahasan pada aspek perkembangan ekonomi daerah, Kabupaten Pesawaran memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi mencapai 5,84 persen dengan tingkat keberagaman dan keberimbangan aktivitas ekonomi pada angka 1,50 yang artinya sangat berkembang. Perkembangan keuangan daerah yang dilihat dari sisi penerimaan, Kabupaten Pesawaran masih sangat bergantung dari dana perimbangan. Pada sisi pengeluaran nilai anggaran belanja hampir mengalami peningkatan setiap tahunnya dan rata-rata rasio antara belanja langsung dan tidak langsung mencapai 49:51. Perkembangan kesejahteraan masyarakat berdasarkan pendapatan per kapita selalu mengalami peningkatan dan tingkat kemiskinan selalu mengalami penurunan. Perkembangan tingkat pengangguran masih berfluktuasi namun telah mencapai 7,27 persen.

[Economic Performance Evaluation of Pesawaran Regency as New Autonomy Region]. Regional division occurs as an aim to improve public services and social welfare. Parallel with their development, new autonomous regions need to be evaluated to measure the extent of its success in achieving their initial target. The aim of this study to evaluate the economic performance of newly autonomous region, Pesawaran Regency. Data are collected by using the method of documentation. The analytical method used are descriptive analysis and entropy diversity index. The study variables set are economic development, regional income, regional expenditure, increasing per capita income, poverty and unemployment. Analysis results and discussions on aspects of regional economic development, Pesawaran Regency had an average economic growth of 5.84 percent, with the level of diversity and balance in their economic activity at 1.50 which is categorized as developed. The financial aspects of the area are approached in terms of regional income; the Pesawaran Regency is still very dependent on Central Government funds. The expenditure of the budget increased almost every year and the average ratio between direct and indirect expenditure reached 49:51. The social welfare development is observed based on GDP per capita, which have constantly achieved improvement, and the poverty rate always decrease. The development on unemployment rate still fluctuates, however have achieved a rate of 7.27 percent.

Keyword: Regional division; regional autonomy; regional economic; regional finance; social welfare.

Citation: Muhammad Fuaedi Hamami, Dr. Ahmda Herison, S.T., M.T., Dwi Bayu Prasetya, S.Si., M.Eng. (2016). Evaluasi Kinerja Perekonomian Daerah Otonom Baru Kabupaten Pesawaran

1. PENDAHULUAN

Sistem pemerintahan di Indonesia mengalami perubahan dari sentralisasi ke desentralisasi pada tahun 1999. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mendefinisikan desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan

pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka pada saat ini pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mengatur dan mengelola wilayahnya (Firman, 2013). Harapan ditetapkan kebijakan ini ialah pemanfaatan sumber daya dan potensi daerah dapat diketahui dan dimanfaatkan dengan lebih optimal. Penelitian Juanda pada tahun 2007, menyatakan bahwa pemekaran daerah memberikan beberapa

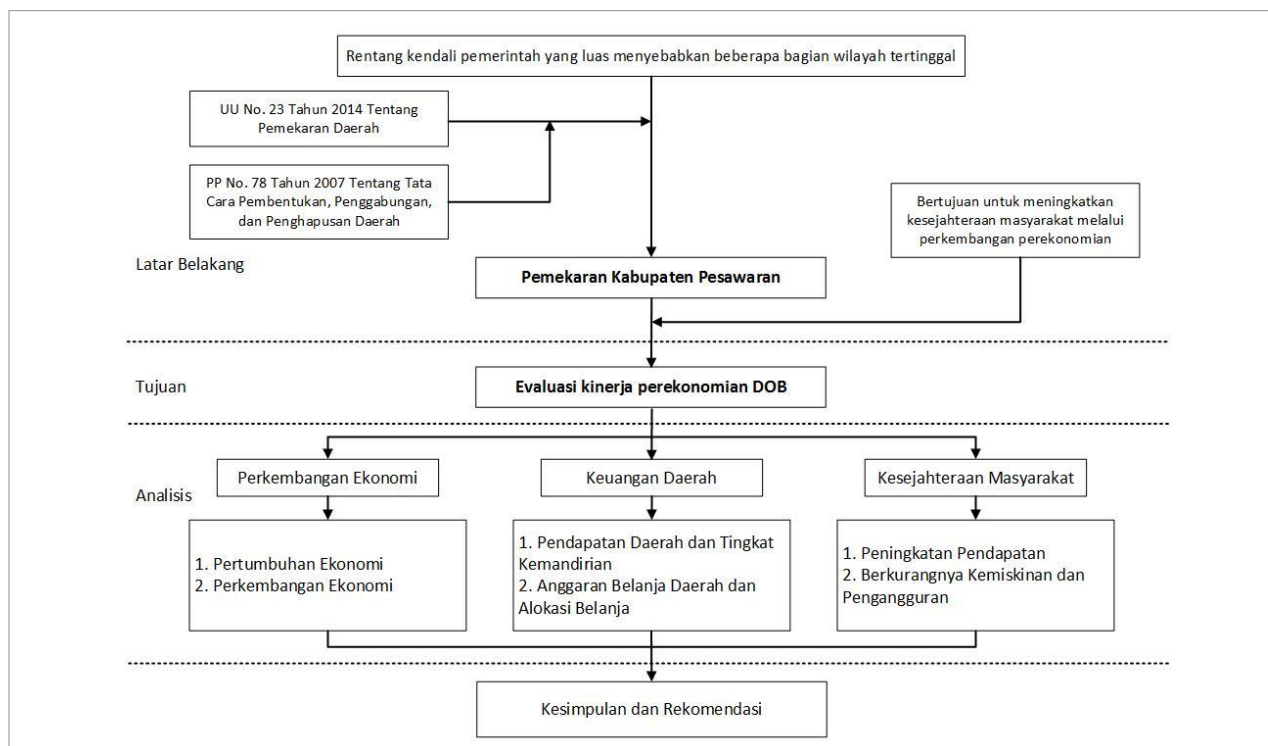
dampak positif bagi daerah baru dan masyarakat lokal yakni peningkatan pelayanan pemerintah daerah terhadap masyarakat, kemungkinan pengelolaan sumber daya alam dengan prinsip-prinsip kearifan lokal dan berkelanjutan, partisipasi masyarakat dan rasa memiliki semakin meningkat, efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya alam kemungkinan meningkat, dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dapat terwujud. Selain memiliki dampak positif, pemekaran daerah juga memiliki kelemahan atau dampak negatif yang akan muncul seperti berdasarkan penelitian Anwar pada Laim (2010) yakni relatif rendahnya kualitas sumber daya manusia, kurangnya dukungan sarana dan prasarana, lemahnya dukungan institusional yaitu sistem organisasi dan manajemen di bawah satu kepemimpinan yang kuat dan bijaksana, kondisi geografis yang tidak mendukung, pudarnya kepercayaan masyarakat pada pemerintah pusat, dan ancaman konflik horizontal maupun vertikal yang dapat menyebabkan gangguan keamanan.

Tujuan pemekaran daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 ialah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan kepada masyarakat, percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi, percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah, percepatan pengelolaan potensi daerah, peningkatan keamanan dan ketertiban, dan peningkatan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah. Disisi lain, tujuan pemekaran daerah seringkali dijadikan sebagai alat untuk menjadi penguasa daerah oleh kalangan politisi. Harapan untuk menduduki posisi tertentu di daerah induk atau daerah otonom baru merupakan salah satu contoh keinginan terselubung oknum tertentu (Irene, 2010). Pernyataan tersebut didukung oleh simpulan analisis Bank Dunia yakni adanya motif pemburu rente para elit yang ingin menjabat di birokrasi lokal dan DPRD dan motif untuk membangun kembali sejarah dan kekuasaan aristokrasi lama yang pernah pudar di masa lalu (Endarto, 2014).

Hasil evaluasi pemekaran daerah yang dilakukan oleh Bappenas dan UNDP pada tahun 2008 menemukan persoalan pemekaran pada DOB yakni jumlah kelembagaan (SKPD) cenderung berlebihan, struktur organisasi yang cenderung besar, serta belum memerhitungkan kriteria efektivitas dan

efisiensi kelembagaan yang baik. Dalam aspek ekonomi, pertumbuhan ekonomi DOB tidak lebih baik dari daerah induk sehingga pemekaran menghasilkan daerah yang harus berjuang keras dalam memperbaiki kesejahteraan masyarakatnya dan peran sektor pemerintah yang relatif besar belum mampu mendorong sektor swasta untuk menggerakkan perekonomian. Namun sisi positifnya ialah pemekaran daerah memungkinkan pemerintah memperbaiki pemerataan fasilitas pendidikan dari tingkat dasar ke tingkat lanjutan (BRIDGE, 2008).

Pemekaran daerah pasca reformasi di Provinsi Lampung pertama kali dilakukan pada tahun 2007 di Kabupaten Pesawaran yang merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Lampung Selatan. Pemekaran daerah yang dilakukan tersebut diharapkan akan berdampak pada kemajuan kedua daerah yang dimekarkan baik terhadap daerah otonom baru maupun daerah induk. Tantangan bagi daerah otonom baru ialah ketergantungan bantuan terhadap daerah induk maupun provinsi dan pusat. Keuntungan geostrategis dari Kabupaten Pesawaran ialah lokasi yang berdekatan dengan Kota Bandar Lampung yang menjadi pusat pemerintahan dan salah satu pusat pengembangan wilayah di Pulau Sumatera. Dengan memanfaatkan perannya sebagai wilayah *hinterland* dari Kota Bandar Lampung, maka potensi perkembangan daerah akan lebih maju daripada daerah kabupaten lain di Provinsi Lampung. Meskipun Kabupaten Pesawaran berusia lebih tua dibandingkan dengan Kabupaten Pringsewu dan Mesuji, namun pertumbuhan ekonominya masih dibawah kedua kabupaten tersebut yakni 5,84 persen dan 5,38 persen serta lebih rendah daripada rata-rata pertumbuhan ekonomi kabupaten dan kota Provinsi Lampung yang mencapai 5,54 persen. Pertumbuhan ekonomi yang rendah menyebabkan kegiatan produksi barang dan jasa juga rendah sehingga berakibat pada menurunnya sediaan lapangan kerja dan penurunan pendapatan. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi kinerja perekonomian daerah otonom baru Kabupaten Pesawaran pasca pemekaran. Untuk mencapai tujuan tersebut, sasaran yang akan dicapai yakni teridentifikasinya kinerja perkembangan ekonomi, perkembangan keuangan daerah, dan perkembangan kesejahteraan masyarakat.



Gambar 1. Kerangka Berpikir Penelitian

2. METODE PENELITIAN

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode dokumentasi. Metode dokumentasi menurut Moeloeng adalah mencari data mengenai hal-hal yang berupa dokumen laporan, catatan, transkrip, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda, dan lain sebagainya (Rachim & Sasana, 2013). Data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dari berbagai instansi pemerintahan di Kabupaten Pesawaran dan Lampung Selatan. Selain itu juga dilakukan wawancara mendalam untuk menggali informasi yang belum tersedia melalui data sekunder. Responden wawancara dipilih menggunakan teknik *judgement sampling*. Teknik *judgement sampling* menurut Juanda adalah prosedur yang digunakan dalam memilih contoh berdasarkan pertimbangan tentang beberapa karakteristik yang cocok berkaitan dengan anggota contoh yang diperlukan untuk menjawab tujuan penelitian (Abdullah, 2011). Responden wawancara dipilih berdasarkan tugas pokok pekerjaan yang dimilikinya sehingga diharapkan dapat menjawab pertanyaan penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian. Data yang diperoleh kemudian dijelaskan dengan memperhatikan perubahan nilai

indikator yang digunakan. Nilai indikator digunakan untuk mengukur sejauh mana usaha pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan melalui pelaksanaan pembangunan daerah.

Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini ialah deskriptif kuantitatif dan Indeks Diversitas Entropi (IDE). Analisis deskriptif kuantitatif merupakan analisis yang menjelaskan data yang sudah terkumpul sebagaimana adanya. Analisis deskriptif digunakan untuk mengetahui perkembangan ekonomi yang dilihat dari pertumbuhan dan perkembangan PDRB, perkembangan penerimaan pendapatan yang dilihat dari pertumbuhan Pendapatan Daerah (PD) dan tingkat kemandirian, perkembangan belanja daerah yang dilihat dari pertumbuhan anggaran belanja dan alokasi belanja, perkembangan kesejahteraan masyarakat yang dilihat dari peningkatan PDRB per kapita, tingkat kemiskinan dan pengangguran. Analisis IDE digunakan untuk melihat perkembangan perekonomian melalui sektor-sektor perekonomian (PDRB) dan perkembangan sumber-sumber pendapatan daerah. Prinsip yang digunakan dalam analisis IDE adalah semakin beragam aktifitas ekonomi atau semakin luas jangkauan spasialnya, maka semakin tinggi nilai IDE-nya, artinya wilayah tersebut

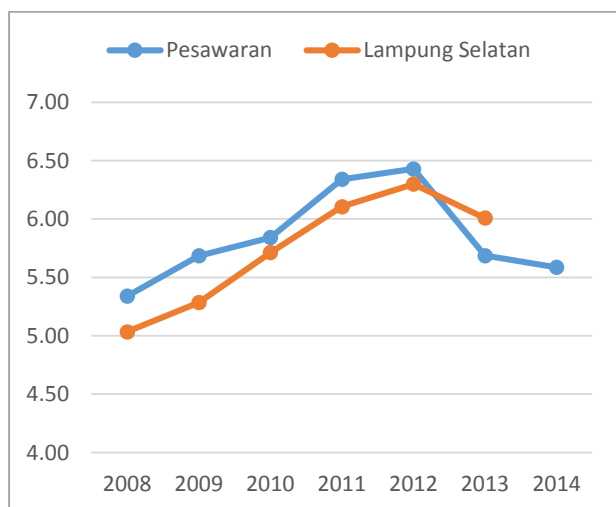
semakin berkembang, jika hasilnya semakin mendekati 1, maka wilayah tersebut semakin berkembang, jika hasilnya semakin mendekati 0 maka wilayah tersebut semakin tidak berkembang (Abdullah, 2011). Penelitian yang dilakukan bersifat komparatif sehingga kedua analisis di atas digunakan untuk melihat kinerja perekonomian pada kedua wilayah yakni Kabupaten Pesawaran sebagai daerah otonom baru dan Kabupaten Lampung Selatan sebagai daerah induk.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini akan dijelaskan kinerja perekonomian daerah otonom baru Kabupaten Pesawaran yang terbagi ke dalam tiga subbagian yakni perkembangan ekonomi, perkembangan keuangan daerah, dan perkembangan kesejahteraan masyarakat.

3.1 Perkembangan Ekonomi

Pada tahun awal pemekaran PDRB Kabupaten Lampung Selatan mencapai 3.721 miliar dan mengalami peningkatan hingga mencapai nilai 5.201 miliar pada tahun 2013. Sedangkan PDRB Kabupaten Pesawaran pada awal pemekaran berada pada nilai 1.415 miliar dan meningkat menjadi 2.106 miliar pada tahun 2014. Perbedaan angka yang cukup signifikan tersebut mengindikasikan bahwa pemekaran daerah yang dilakukan belum memperhatikan persebaran potensi ekonomi sehingga terjadi ketimpangan pada kedua daerah tersebut.



Gambar 2. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi kedua kabupaten mengalami peningkatan sejak tahun 2007. Namun pada tahun 2013 terjadi pelambatan pertumbuhan ekonomi yakni Kabupaten Pesawaran menurun sampai 5,69 persen dan Kabupaten Lampung Selatan menurun sampai 6,01 persen. Pelambatan pertumbuhan ekonomi terjadi sebagai dampak dari pelambatan ekonomi nasional dan provinsi pada sektor pertanian dan industri pengolahan serta pelambatan pertumbuhan investasi (Today News, 2016).

Tabel 1. Indeks Diversitas Entropi PDRB

Tahun	Kabupaten	
	Pesawaran	Lampung Selatan
2007	1,42	1,62
2008	1,43	1,64
2009	1,44	1,66
2010	1,46	1,67
2011	1,47	1,69
2012	1,48	1,71
2013	1,49	1,73
2014	1,50	-

Nilai IDE PDRB kedua kabupaten berada di atas 1 yang artinya sangat berkembang. Kedua kabupaten mengalami peningkatan yang stabil yang berarti bahwa semua sektor ekonomi berkembang dan mengindikasikan kemajuan pada sektor yang memiliki kontribusi kecil terhadap perekonomian seperti listrik, gas, dan air bersih; bangunan; dan keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan. Meskipun begitu sektor basis ekonomi masih mendominasi dan menjadi tumpuan perekonomian. Hal ini terjadi karena pemerintah kedua kabupaten lebih memfokuskan pembangunan di sektor basis yang diharapkan menjadi penarik perkembangan sektor ekonomi lainnya.

3.2 Perkembangan Keuangan Daerah

Sumber pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Dana perimbangan memiliki kontribusi terbesar terhadap pendapatan daerah yang mencapai 78 persen, sedangkan kontribusi pendapatan asli daerah dan lain-lain

pendapatan yang sah masing-masing 5 persen dan 17 persen.

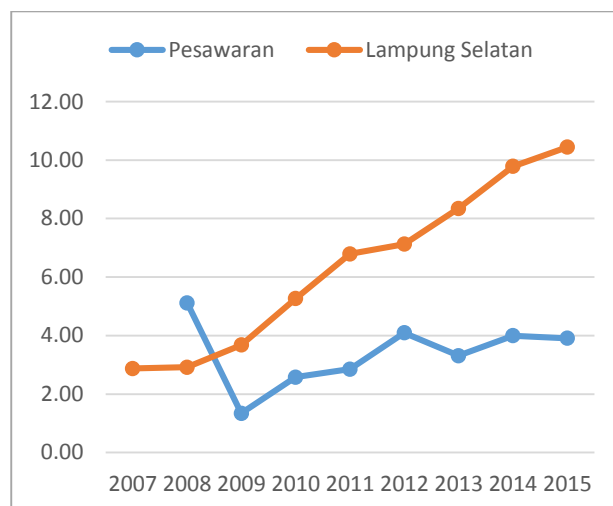
Tabel 2. Indeks Diversitas Entropi Pendapatan Daerah

Tahun	Kabupaten	
	Pesawaran	Lampung Selatan
2007	-	0,51
2008	0,82	0,33
2009	0,39	0,55
2010	0,30	0,54
2011	0,41	0,78
2012	0,52	0,70
2013	0,56	0,72
2014	0,58	0,75
2015	0,68	0,85

Pendapatan daerah dikatakan berkembang jika terjadi keberagaman sumber-sumber pendapatan. Pada tahun 2008 nilai IDE Pendapatan Daerah Kabupaten Pesawaran mencapai 0,82. Sebaliknya terjadi penurunan nilai IDE Pendapatan Daerah di Kabupaten Lampung Selatan karena terjadi penurunan sumber pendapatan lain-lain yang sah sebagai implikasi dari berlakunya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa sumber pendapatan Kabupaten Pesawaran pada tahun 2008 dan 2009 berasal dari Kabupaten Lampung Selatan dan Provinsi Lampung. Pada tahun 2009 dan 2010 terjadi penurunan nilai IDE Pendapatan Daerah di Kabupaten Pesawaran yang disebabkan oleh terputusnya bantuan keuangan dari Kabupaten Lampung Selatan dan digantikan dengan dana perimbangan dari Pemerintah Pusat dengan jumlah yang sangat besar untuk menyeimbangkan neraca belanja daerah. Jumlah dana perimbangan yang diperoleh mencapai 300 miliar yang digunakan untuk membiayai gaji pegawai yang jumlahnya bertambah sebagai alat untuk pelaksanaan pemerintahan dan untuk membiayai pembangunan daerah. Pada tahun 2011 sumber pendapatan kedua daerah mulai berkembang menuju arah yang positif. Dapat dikatakan bahwa sebelum tahun 2011 merupakan masa penyesuaian pemekaran daerah sehingga kondisi sumber pendapatan berfluktuasi.

Pendapatan asli daerah yang selalu meningkat tiap tahunnya mengindikasikan bahwa pemerintah telah melakukan optimalisasi dalam pengelolaan

sumber pendapatan. Conchrane dalam tulisannya menyatakan bahwa seorang pakar dari World Bank berpendapat bahwa PAD harus menyumbang pendanaan untuk pembangunan minimal 20 persen untuk menjalankan otonomi daerah. Lanjut jika PAD kurang dari batas minimal tersebut maka daerah akan kehilangan kredibilitasnya sebagai kesatuan yang mandiri (Abdullah, 2011).

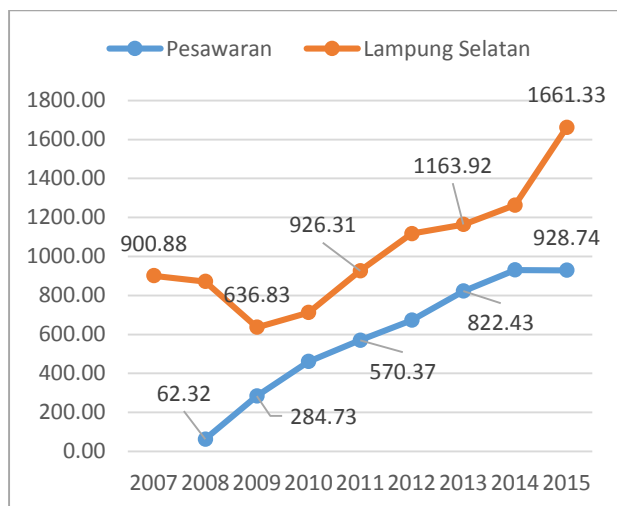


Gambar 3. Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Berdasarkan Gambar 3 di atas, terlihat bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah yang dilihat dari perbandingan antara pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah di Kabupaten Lampung Selatan melesat meninggalkan Kabupaten Pesawaran yang berfluktuasi dan cenderung berada di sekitar 4 persen. Hal tersebut terjadi karena sumber-sumber pendapatan asli daerah saling berkembang satu sama lain, namun kondisi tersebut belum terjadi di Kabupaten Pesawaran. Adapun sumber-sumber pendapatan asli daerah Kabupaten Pesawaran yang terdiri dari pajak, retribusi, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah memiliki kontribusi secara berturut-turut ialah 25,15 persen; 10,18 persen; 0,26 persen; dan 64,41 persen. Pada tahun 2009 pendapatan asli daerah Kabupaten Lampung Selatan mengalami penurunan 542,02 juta rupiah sedangkan penurunan pendapatan asli daerah di Kabupaten Pesawaran terjadi pada tahun 2013 dengan nilai mencapai 1,75 miliar rupiah. Kondisi tersebut di Kabupaten Lampung Selatan disebabkan karena masih dalam masa transisi pembagian pendapatan asli daerah pasca pemekaran daerah

baru. Disisi lain penurunan pendapatan asli daerah yang terjadi di Pesawaran disebabkan karena tidak memperoleh hasil bagian laba penyertaan modal dan penurunan pendapatan pajak dari sektor pertambangan dan penggalian sumber daya mineral dan logam.

Perkembangan anggaran pendapatan belanja daerah menunjukkan sejauh mana usaha pemerintah dalam mempercepat pelaksanaan pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang menjadi tujuan utama dilakukannya pemekaran daerah. Semakin besar anggaran belanjanya maka semakin banyak program pembangunan yang dilakukan sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah dan terbukanya lapangan kerja baru.



Gambar 4. Perkembangan APBD (dalam Miliar)

Secara umum anggaran belanja setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan kecuali pada tahun awal pasca pemekaran di Kabupaten Lampung Selatan dan pada tahun 2015 di Kabupaten Pesawaran. Penurunan nilai anggaran yang terjadi pada tahun 2008 dan 2009 di Kabupaten Lampung Selatan terjadi karena pemekaran daerah Kabupaten Pesawaran sehingga program pembangunan daerah berkurang seiring dengan berkurangnya luas wilayah administrasi. Sedangkan penurunan anggaran belanja yang terjadi di Kabupaten Pesawaran pada tahun 2015 disebabkan karena terjadi defisit anggaran pada tahun-tahun sebelumnya.

Pertumbuhan anggaran terjadi sangat signifikan pada tahun 2009 di Kabupaten Pesawaran yang

mencapai 356,85 persen dikarenakan adanya peningkatan terhadap dana alokasi umum dan penyesuaian terhadap kebutuhan jumlah aparatur pemerintahan dan infrastruktur penunjang. Terlihat dalam Gambar 4 perkembangan APBD tidak konstan karena laju pertumbuhan anggaran berfluktuasi. Kondisi ini disebabkan karena kebijakan pemerintah dalam menetapkan program pembangunan menyesuaikan dengan pendapatan daerah dan penyerapan anggaran tahun sebelumnya.

Belanja langsung merupakan belanja pembangunan yang sedangkan belanja tidak langsung merupakan belanja untuk kebutuhan administrasi dan pelaksanaan pemerintahan. Salah satu Pegawai Bidang Perekonomian Bappeda Pesawaran menyatakan bahwa idealnya alokasi anggaran untuk belanja langsung harus lebih besar daripada belanja tidak langsungnya atau seminimalnya harus mencapai porsi yang seimbang. Hal tersebut perlu diupayakan agar pembangunan yang dilakukan akan berdampak positif secara langsung terhadap masyarakat.



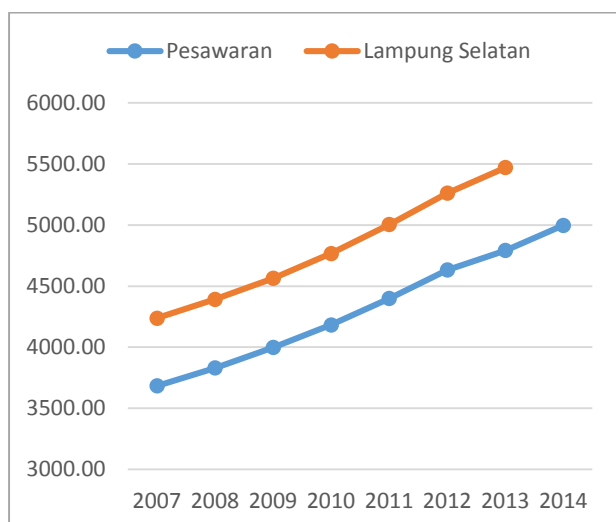
Gambar 5. Proporsi Anggaran Belanja Langsung

Berdasarkan Gambar 5 dapat dikatakan bahwa kebijakan alokasi belanja langsung Kabupaten Pesawaran lebih baik daripada Kabupaten Lampung Selatan. Hal ini ditandai dengan meningkatnya proporsi anggaran belanja langsung dari tahun 2009 sampai 2013 meskipun mengalami penurunan pada tahun 2014 dan 2015 yang dikarenakan menurunnya nilai anggaran belanja daerah. Pada awal pemekaran proporsi belanja langsung

mencapai titik tertinggi karena pada masa tersebut sebagai implikasi dari terbentuknya daerah otonom baru sehingga memerlukan pembangunan infrastruktur penunjang dengan skala lebih besar. Perkembangan alokasi belanja langsung Kabupaten Lampung Selatan karakteristiknya sama dengan yang terjadi di Kabupaten Pesawaran yakni berfluktuatif namun pencapaian anggaran belanja langsung tidak pernah melewati 50 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah kurang memperhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat sehingga penetapan alokasi belanja langsungnya tidak lebih besar dari anggaran untuk belanja tidak langsung.

3.2 Perkembangan Kesejahteraan Masyarakat

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada umumnya dihubungkan dengan pengurangan tingkat kemiskinan dan perbaikan pemerataan (*equity*) (Laim, 2010). Besarnya nilai PDRB menggambarkan terjadinya peningkatan produksi barang dan jasa sehingga lapangan pekerjaan akan meningkat dan masyarakat memiliki kesempatan untuk memperbaiki kualitas hidupnya. Dari berbagai indikator ekonomi, indikator mengenai pendapatan masyarakat di suatu wilayah merupakan indikator yang terpenting (Rustiadi, Saefulhakim, & Panuju, 2009).



Gambar 6. Pendapatan Per Kapita

Perkembangan pendapatan per kapita memiliki karakteristik yang sama dengan pertumbuhan ekonomi daerah. Pendapatan per kapita pada

kedua daerah selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan tertinggi pada kedua kabupaten terjadi di tahun 2012 yakni 5,31 persen di Kabupaten Pesawaran dan 5,14 persen di Kabupaten Lampung Selatan. Dapat dikatakan bahwa pemekaran telah berhasil dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari aspek pendapatan per kapita. Nilai pendapatan per kapita Kabupaten Lampung Selatan lebih tinggi karena potensi perekonomian daerahnya lebih besar, namun jika dilihat dari segi pertumbuhan pendapatan per kapitanya Kabupaten Pesawaran lebih unggul.

Beberapa literatur terdapat pendapat yang berbeda terkait penggunaan indikator pendapatan per kapita karena diyakini tidak dapat dinyatakan sebagai indikator utama kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (Irene, 2010). Hal tersebut terjadi karena PDRB per kapita tidak mempertimbangkan distribusi dan hanya memperhatikan rata-rata pendapatan. Oleh karena itu juga dilihat dari segi perkembangan tingkat penduduk miskin dan pengangguran (Abdullah, 2011).

Tabel 3. Tingkat Kemiskinan

Tahun	Kabupaten	
	Pesawaran	Lampung Selatan
2007	-	26,94
2008	-	24,72
2009	22,73	22,83
2010	20,48	20,61
2011	19,06	19,23
2012	18,01	18,19
2013	17,86	17,09
2014	17,51	16,77

Berdasarkan Tabel 3 di atas tingkat kemiskinan mengalami perkembangan menuju arah yang positif. Tingkat kemiskinan penduduk di Kabupaten Lampung Selatan menurun ke angka 16,77 persen dari angka 26,94 persen pada awal pemekaran. Sedangkan tingkat kemiskinan penduduk di Kabupaten Pesawaran menurun dari 22,73 persen ke angka 17,51 persen. Perkembangan jumlah penduduk miskin tersebut terjadi karena Pemerintah Kabupaten Pesawaran berhasil dalam melakukan program pemberdayaan masyarakat

pada sektor pertanian melalui bantuan bibit dan pupuk tanaman pertanian dan sektor pariwisata melalui pembinaan kelompok sadar wisata. Hal yang sama juga dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan yang memprioritaskan pertanian sebagai fokus pembangunan khususnya masyarakat perdesaan. Sejalan dengan pertumbuhan per kapita yang terus meningkat, membuktikan bahwa terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah induk maupun otonom baru.

Tabel 4. Tingkat Pengangguran

Tahun	Kabupaten	
	Pesawaran	Lampung Selatan
2008	-	8,68
2009	7,48	7,39
2010	5,90	5,46
2011	7,33	8,40
2012	6,62	6,10
2013	9,60	6,25
2014	8,54	6,05
2015	7,27	5,38

Perkembangan tingkat pengangguran selama kurun waktu dari tahun 2008 sampai 2015 berfluktuasi. Terjadi penurunan tingkat pengangguran di awal pemekaran namun meningkat pada tahun 2011 dikarenakan perekonomian yang belum stabil sebagai akibat dari pemekaran wilayah yang dilakukan. Pada tahun berikutnya mengalami penurunan dan kemudian meningkat kembali pada tahun 2013 karena pada tahun tersebut terjadi pelambatan pertumbuhan ekonomi wilayah sebagai dampak dari pelambatan pertumbuhan ekonomi nasional dan provinsi. Sejak tahun 2013 hingga 2015 di kedua kabupaten tingkat penganggurannya selalu menurun sampai dengan angka 7,25 persen di Kabupaten Pesawaran dan 5,38 persen di Kabupaten Lampung Selatan.

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pemerintah setempat membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mengentaskan persoalan pengangguran pasca pemekaran daerah khususnya di Kabupaten Pesawaran. Meskipun pola perkembangan tingkat penganggurannya sama namun kondisi di Kabupaten Lampung Selatan lebih baik dikarenakan pemerintah setempat telah

mengantisipasi dampak yang ditimbulkan dari pemekaran daerah. Selain itu juga potensi ekonomi di Kabupaten Lampung Selatan lebih besar dan terdapat salah satu kawasan industri strategis berskala nasional.

4. KESIMPULAN

Tujuan pemekaran daerah pada aspek percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah sudah menunjukkan tanda-tanda perkembangan yang baik di Kabupaten Pesawaran. Sebaliknya perwujudan percepatan pengelolaan potensi daerah melalui kinerja keuangan daerah masih belum terlihat secara jelas.

Pada aspek perkembangan ekonomi daerah, Kabupaten Pesawaran memiliki pertumbuhan ekonomi rata-rata yang mencapai 5,84 persen, sedangkan pertumbuhan ekonomi rata-rata Kabupaten Lampung Selatan yakni 5,74 persen. Jika dilihat dari perkembangan antar sektor perekonomian, keberagaman dan keberimbangan aktivitas atau sektor ekonomi di Kabupaten Lampung Selatan mencapai nilai 1,73 yang masih lebih baik daripada yang terjadi di Kabupaten Pesawaran yang mencapai nilai 1,50.

Pada aspek perkembangan keuangan daerah yang dilihat dari penerimaan dan belanja (pengeluaran). Pada sisi penerimaan Kabupaten Pesawaran masih sangat bergantung dari dana perimbangan. Pendapatan asli daerah yang diperoleh sulit berkembang sehingga menyebabkan tingkat kemandirian yang rendah dengan nilai rata-rata kontribusi 3,4 persen. Sebaliknya pendapatan asli daerah Kabupaten Lampung Selatan mengalami peningkatan yang cukup besar tiap tahunnya sehingga pada tahun 2015 tingkat kemandirian keuangannya mencapai 10,44 persen. Disisi lain pada perkembangan anggaran belanja dan penetapan kebijakan alokasi belanja, Kabupaten Pesawaran lebih diunggulkan karena rata-rata pertumbuhan anggaran belanjanya lebih tinggi serta rasio alokasi belanja langsung dan tidak langsung mencapai 49:51.

Pada aspek perkembangan kesejahteraan masyarakat kedua daerah memiliki karakteristik yang hampir sama. Perkembangan pendapatan per

kapita dan tingkat kemiskinan menuju kearah yang positif. Sampai dengan tahun 2014 persentase penduduk miskin Kabupaten Lampung Selatan berada pada angka 16,77 persen sedangkan Kabupaten Pesawaran yakni 17,51 persen. Jika dilihat dari rata-rata tingkat penganggurannya Kabupaten Lampung Selatan berada pada angka 6,13 persen, sedangkan Kabupaten Pesawaran berada pada angka 7,53 persen. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pemekaran daerah di Kabupaten Pesawaran memberikan dampak yang positif terhadap peningkatan pendapatan dan penurunan tingkat kemiskinan. Disisi lain pemekaran daerah tersebut belum memberikan dampak yang besar terhadap pengurangan jumlah pengangguran.

5. DAFTAR PUSTAKA

Jurnal dan Prosiding

- Endarto. (2014). Evaluasi Pemekaran Daerah di Era Reformasi. *Jurnal Lingkar Widyaaiswara Edisi 1 Nomor 4*, 60-66.
- Firman, T. (2013). Territorial Splits (Pemekaran Daerah) in Decentralising Indonesia, 2000 - 2012: Local Development Drivers or Hindrance? *Space and Polity Volume 12 Number 2*, 180-196.
- Juanda, B. (2007). Manfaat dan Biaya Pemekaran Daerah Serta Implikasinya Terhadap APBN. *Jurnal Ekonomi Volume XXV Oktober*.
- Rachim, R. F., & Sasana, H. (2013). Evaluasi Dampak Pemekaran Daerah Terhadap Kinerja Ekonomi dan Kinerja Pelayanan Publik di Kota Serang. *Diponegoro Journal of Economics*, 1-13.

Tugas Akhir dan Tesis

- Abdullah, M. A. (2011, Juni 11). Kajian Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Pembangunan Daerah (Studi Kasus: Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat). *Master Thesis*. Bogor, Jawa Barat, Indonesia: Sekolah Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor.
- Irene, P. L. (2010, Juni). Dampak Pemekaran Daerah Terhadap Perekonomian Kabupaten Bekasi. *Undergraduate Thesis*. Bandung, Jawa Barat, Indonesia: Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi Bandung.
- Laim, D. J. (2010, Maret). Analisis Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Perkembangan Perekonomian Wilayah Kabupaten Kepulauan Aru Provinsi Maluku. *Master Thesis*. Bogor, Jawa Barat, Indonesia: Sekolah Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor.

Website dan Surat Kabar

- Today News*. (2016, Mei 16). Diakses pada 29 Agustus 2016, dari Lampung Today: <http://www.lampungtoday.com/go/today-news/pesawaran/9815-pertumbuhan-ekonomi-pesawaran-dipengaruhi-tiga-sektor-penunjang.html>

Buku

- Rustiadi, E., Saefulhakim, S., & Panuju, D. R. (2009). *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Dokumen Pemerintah

- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; United Nations Development Programme. (2008). *Studi Evaluasi Pemekaran Daerah 2001-2007*. Jakarta: BRIDGE.

Undang-undang dan Peraturan

- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran
- Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penggabungan, Penghapusan Daerah (Revisi dari Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000) Tentang Tata Cara Pembentukan, Penggabungan, Penghapusan Daerah